

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dilakukan dengan mendasarkan pada : a) hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2017 disandingkan dengan target kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga periode Tahun 2017; b) identifikasi permasalahan pembangunan daerah; c) rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka keuangan daerah tahun 2019, termasuk juga memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang; serta d) mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian sasaran pembangunan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021. Adapun Visi Kabupaten Purbalingga adalah **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**.

Makna yang termuat dalam Visi Kabupaten Purbalingga tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai

pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

- b. Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.
- c. Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.
- d. Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 yang ingin dicapai adalah:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
- b. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;

- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- f. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai;
- g. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ketujuh Misi Kabupaten Purbalingga beserta Tujuan dan Sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan sebagaimana dalam RPJMD 2016-2021 diuraikan sebagai berikut :

- a. Misi 1:** Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.

Untuk mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif, dibutuhkan dukungan aparatur pemerintahan dengan jumlah yang cukup dan dengan kompetensi yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas, dan sikap dan perilaku aparatur yang baik, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran politik rakyat sejalan dengan adanya proses demokratisasi, mengakibatkan semakin menguatnya tuntutan masyarakat untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu, adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

- b. Misi 2 :** Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.

Salah satu prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah terwujudnya lingkungan sosial yang tertib, aman, damai dan tenteram. Kondisi ini harus diciptakan agar berbagai upaya pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dijalankan. Adanya keragaman agama dan budaya, perbedaan kondisi sosial-ekonomi, masalah kemiskinan dan pengangguran, dan berbagai permasalahan sosial lain seperti merebaknya miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, dan premanisme, serta meningkatnya kejadian kriminalitas, merupakan faktor-faktor potensial untuk timbulnya gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Selain itu, meningkatnya kesadaran politik masyarakat harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengembangkan etika politik sehingga dapat diwujudkan kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat. Pembangunan karakter dan paham kebangsaan mutlak diperlukan guna terwujudnya rasa nasionalisme yang tinggi.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah: Terwujudnya ketentraman, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat, dengan Sasaran :

1. Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan.
2. Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati.
3. Menurunnya resiko bencana.
4. Terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat

- c. Misi 3:** Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak

Salah satu indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah tercukupinya kebutuhan pokok manusia khususnya pangan dan papan bagi

seluruh masyarakat. Tercukupinya pangan dan papan secara layak juga merupakan landasan yang harus di bangun secara kokoh agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih cepat, lebih adil dan lebih merata. Pemerintah daerah memiliki kewajiban yang besar dalam upaya menurunkan kasus kerawanan pangan dan gizi buruk serta pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan sehat, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah:

- 1) Meningkatnya Status Ketahanan Pangan, dengan sasaran meningkatnya Status Pangan Masyarakat.
- 2) Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni, dengan sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

d. Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas manusia dapat diukur dari aspek-aspek yang bersifat lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Kualitas manusia yang dicita-citakan di samping diukur dari beberapa hal tersebut, juga diukur dari kepribadian/jatidiri dan kecintaan terhadap kebudayaan dan tanah air serta tertanamnya semangat nasionalisme. Sedangkan kualitas kehidupan manusia diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar serta tersedianya secara memadai berbagai prasarana dan sarana guna terwujudnya kehidupan yang berkualitas.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-4 adalah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- 3) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
- 4) Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
- 5) Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
- 6) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 7) Meningkatnya budaya gemar membaca.

- 8) Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya (BCG) serta Prestasi Seni.
 - 9) Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.
- e. **Misi ke-5** : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

Pembangunan ekonomi menduduki posisi yang sangat strategis karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai hasil dari pembangunan ekonomi akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan semakin meningkatkan aktifitasnya dalam bidang ekonomi.

Upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata.

Tujuan jangka menengah dari Misi ke - 5 adalah Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan Sasaran : meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, berkurangnya angka pengangguran, serta terkendalinya angka inflasi

- f. **Misi ke-6** : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan,

pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi prasarana jalan, jembatan, irigasi dan pengairan, perumahan dan permukiman, prasarana persampahan, pemerintahan, perhubungan, serta berbagai prasarana wilayah lainnya.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 6 adalah :

- 1) Mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum yang handal dan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, produktif dan berkelanjutan, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah
 - b) Ketersediaannya air permukaan untuk pertanian pada jaringan irigasi primer dan sekunder
 - c) Meningkatnya akses air limbah domestik / RT
 - d) Meningkatnya akses pelayanan persampahan
 - e) Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang,
 - f) Meningkatnya akses air bersih
 - g) Meningkatnya kepastian status dan pemanfaatan tanah
 - h) Meningkatnya kapasitas dan kualitas angkutan serta fasilitas perlengkapan jalan
 - i) Meningkatnya imple-mentasi e government dan keterbukaan informasi publik.
- 2) Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman, dengan Sasaran Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.
- 3) Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kualitas pelayanan desa, dengan sasaran meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa.

g. Misi ke-7 : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Eksplorasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktifitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti pencemaran air dan udara, timbulnya berbagai penyakit, merosotnya hasil tangkapan ikan sungai, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna khas/langka, munculnya lahan rusak termasuk deforestasi, terjadinya banjir dan tanah longsor, sulitnya mendapatkan air pada musim kemarau, berpindahnya aliran sungai, dan sebagainya.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai salah satu sumberdaya yang potensial juga belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Untuk mengantisipasi berbagai hal tersebut di atas dibutuhkan kebijakan besar yang bersifat kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-7 adalah terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, dengan sasaran terkendalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Adapun tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Purbalinga Tahun 2019 dan Prakiraan Maju tahun 2020 sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021 adalah sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Purbalingga

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA 2017	TARGET KINERJA SASARAN	
					2019	2020
1	2	3	4	5	7	8
	Misi 1: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.					
	Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat					
1.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)	Poin	78,37	79,5	80
		Opini audit keuangan BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
		Kategori Akuntabilitas Kinerja	Poin	57,75	65	68
		Hasil Penilaian LPPD	Poin	3,2954 *)	3,35	3,4
	Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan					
	Tujuan : Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Dan Rasa Aman Dalam Masyarakat					
1.	Terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat .	Angka Kriminalitas	per 10.000 penduduk	3,75 (356 kejadian)	3,55	3.33
2.	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Perda dan Perbup	Persentase Pelanggaran Perda Ditangani	Persen	100	100	100
3.	Menurunnya Indeks Resiko Bencana	Cakupan Korban Bencana Terlayani	Persen	63	100	100
4.	Meningkatnya Paham dan Wawasan Kebangsaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	Persen	-	70	70

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA 2017	TARGET KINERJA SASARAN	
					2019	2020
1	2	3	4	5	7	8
	Misi 3: Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak					
	Tujuan : Meningkatnya Ketahanan Pangan					
1.	Meningkatnya Status Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	85	89	90
	Tujuan : Meningkatnya Ketersediaan Dan Kepemilikan Rumah Layak Huni					
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	Cakupan Rumah Layak Huni	Persen	92,29	92,1	93
		Cakupan Kepemilikan Rumah	Persen	81,96	86,12	87,62
	Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat					
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Manusia					
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Harapan lama sekolah	Angka	11,94	12,1	12,3
		Rata2 lama sekolah	Tahun	6,87	7,1	7,
		Angka Kelulusan SD	persen	100	100	100
		Angka Kelulusan SMP	persen	99,72	100	100
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,86 *	73,1	73,3
3.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata angka kelahiran total/ TFR	angka	2,47	2,25	2,15
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	78,01	79	80
5.	Meningkatnya Pelayanan PMKS dan Kelompok Rentan Lain	Persentase PMKS yang terlayani	Persen	68,56	69	70
6.	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangu-nan Gender	Angka	63,43 *	> 65	> 66
		Cakupan Kekerasan Anak Tertangani	Persen	100	100	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA 2017	TARGET KINERJA SASARAN	
					2019	2020
1	2	3	4	5	7	8
7.	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca	Rasio Perpustakaan per jumlah penduduk	rasio	0,001158113	0,001178	0,001214
8.	Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian benda cagar budaya serta prestasi seni	Jumlah gedung/ tempat gelar seni	Unit	11	11	12
		Intensitas pementasan seni budaya daerah	Kali	69	72	74
9.	Meningkatnya Prestasi Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat capaian cabang olah raga prestasi Nasional	persen	2	2	4
Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja						
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat						
1.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, berkurangnya angka pengangguran, serta terkendalinya angka inflasi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,33	5	5
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	5,12	5,5	5,5
		Laju Inflasi	persen	3,52	dibawah 5	dibawah 5
		Angka Kemiskinan	persen	18,8	18	17
Misi ke-6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai						
Tujuan : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan						
1.	Meningkatnya Akses Dan Konektivitas Wilayah	Panjang jalan kondisi mantap	persen	78,95	83,75	88,78

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA 2017	TARGET KINERJA SASARAN	
					2019	2020
1	2	3	4	5	7	8
2.	Ketersediaannya air permukaan untuk pertanian pada jaringan irigasi primer dan sekunder	Cakupan air irigasi	persen	87,5	88	89
3.	Meningkatnya Akses Aman Air Minum yang Berkelanjutan	Cakupan RT Mengakses Air Bersih	Persen	87,60	<u>100</u>	100
4.	Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik / RT	Cakupan RT Terlayani Sistem Air Limbah	Persen	84,35	<u>100</u>	100
5.	Meningkatnya Akses Pelayanan Persampahan	Cakupan Timbulan Sampah Terlayani	Persen	55,5	64	60
6.	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yg Efektif	Pemanfaatan Ruang sesuai peruntukan	persen		100	100
7.	Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Angkutan Serta Fasilitas Perlengkapan Jalan	Angka kecelakaan lalu lintas	per 10000 penduduk	6,03 (556 kejadian)	5,78	5,52
8.	Meningkatnya Implementasi <i>e-gov</i> dan Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat keterbukaan informasi publik	poin		60	70
9	Meningkatnya kepastian status dan pemanfaatan tanah	Persentase tanah pemerintah daerah bersertifikat	Persen	63,07	90	95
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman					
1.	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman	Luasan kawasan kumuh perkotaan	Persen	13,88	10,8	5,4
	Tujuan : Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Desa					

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA 2017	TARGET KINERJA SASARAN	
					2019	2020
1	2	3	4	5	7	8
1.	Meningkatnya kualitas desa	Indek Desa Membangun (IDM)	poin	0,6394	0,65	0,67
	Misi ke-7 : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup					
	Tujuan : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati					
1.	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	43,6	65,5	66,5

Keterangan : * = Data Tahun 2016

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

Mengingat tahun 2019 merupakan tahun ketiga pelaksanaan rencana pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Purbalingga tahun 2016–2021, maka rencana pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2019 juga diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, maka disusun 7 prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2019, yaitu : 1). Pemenuhan Kebutuhan Pokok Manusia; 2). Peningkatan Kualitas Manusia; 3). Peningkatan Daya Saing Ekonomi; 4). Pengurangan Kesenjangan Wilayah; 5). Pelestarian Lingkungan Hidup; 6). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; 7). Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Secara lebih detil, 7 prioritas rencana kerja tahun 2019 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Manusia, fokus pada :
 - 1) Pemenuhan kebutuhan pangan utama bagi masyarakat, termasuk dalam upaya penanganan stunting;
 - 2) Penyediaan rumah layak huni antara lain melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni dan fasilitasi pembangunan perumahan swadaya.
- b. Peningkatan Kualitas Manusia, fokus pada :
 - 1) Peningkatan derajat pendidikan masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan dari sisi sarana prasarana, pembiayaan, tenaga pendidik dan kependidikan, serta penguatan manajemen pendidikan;
 - 2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dari sisi sarana prasarana, pembiayaan, tenaga kesehatan, serta penguatan manajemen kesehatan.
 - 3) Peningkatan cakupan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, serta pengendalian penduduk;
 - 4) Pembinaan perpustakaan dan pengembangan perpustakaan digital;
 - 5) Fasilitasi pementasan, pengiriman dan pelestarian seni budaya daerah;
 - 6) Peningkatan fasilitasi dan pengembangan even kepemudaan, serta peningkatan kompetisi olahraga prestasi.
 - 7) Peningkatan fasilitasi dan pembinaan PMKS serta pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial.

- c. Peningkatan Daya Saing Ekonomi, fokus pada :
 - 1) Pengembangan pariwisata melalui peningkatan jumlah dan kualitas atraksi, peningkatan sarana prasarana amenities, dan peningkatan aksesibilitas wilayah;
 - 2) Introduksi teknologi dan pengembangan industri mikro, kecil dan menengah, terutama yang berbahan baku lokal;
 - 3) Peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja;
 - 4) Peningkatan manajemen, pengembangan dan pengawasan koperasi;
 - 5) Peningkatan manajemen dan jejaring usaha bagi usaha mikro;
 - 6) Introduksi teknik dan teknologi budi daya pertanian yang unggul dan pengembangan hortikultura / buah - buahan untuk substitusi impor;
 - 7) Penerapan teknologi budidaya, pakan dan genetika ternak;
 - 8) Penerapan teknologi budidaya, pakan dan genetika ikan;
 - 9) Peningkatan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat
- d. Pengurangan Kesenjangan Wilayah, fokus pada :
 - 1) Meningkatkan akses antar wilayah dalam kabupaten melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan dan jembatan penghubung, serta peningkatan akses antar daerah melalui fasilitasi pengembangan Bandara;
 - 2) Percepatan pembangunan serta pemeliharaan bendung, serta sarpras irigasi primer dan sekunder;
 - 3) Peningkatan kualitas prasarana pemerintahan;
 - 4) Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana permukiman;
 - 5) Penyempurnaan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan umum
- e. Pelestarian Lingkungan Hidup, fokus pada peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui konservasi sumber air; pengendalian pencemaran tanah dan udara; pengelolaan sampah dan limbah berbasis masyarakat; serta peningkatan kualitas ruang terbuka hijau.
- f. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, fokus pada :
 - 1) Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik;
 - 2) Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan ASN yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun Sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian

dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP; meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;

- 3) Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya *clean and clear government* dan menerapkan "keperantaraan dan *enterpreuneur*" dalam tata kelola pemerintahan.
- 4) Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Kabupaten Purbalingga.

g. Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum, fokus pada :

1. Peningkatan wawasan kebangsaan dan kehidupan beragama melalui ketahanan ideologi Pancasila, semangat nasionalisme dan patriotism, pencegahan intoleransi umat beragama, radikalisme, terorism, *hate speech* dan *hoax news* dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kondusivitas wilayah Kabupaten Purbalingga.
2. Peningkatan dan optimalisasi penanganan narkoba, konflik sosial dan horisontal;
3. Terselenggaranya pemilihan presiden, wakil presiden dan legislatif yang jujur, adil dan kondusif di kabupaten purbalingga.
4. Peningkatan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana, melalui peningkatan kapasitas dalam menghadapi resiko bencana dan menurunkan kerentanan bencana alam.

1.3. Sinkronisasi Prioritas Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2019 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Purbalingga juga disusun dengan memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, terutama yang tertuang dalam prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 dan prioritas pembangunan

Provinsi Jawa Tengah 2019, sebagai bentuk keselarasan antara kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten.

Pembangunan Kabupaten Purbalingga diselaraskan dengan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, yaitu :

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selanjutnya, pada pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2019 diselaraskan dengan 5 (lima) prioritas pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019) “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, antara lain :

- Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen.
- Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
- Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2019 diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan Nasional, sebagai berikut:

- a. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;
- b. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;
- c. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif;
- d. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air;
- e. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Secara lengkap sinkronisasi kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana terdapat pada tabel 4.2.

Di samping itu, pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 juga diselaraskan dengan prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Mendasarkan pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan isu strategis pembangunan, maka pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019 diarahkan untuk pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah berlandaskan pada sumber daya manusia yang semakin berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas dan kondusivitas wilayah yang semakin mantap serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan prioritas:

- a. Penanggulangan kemiskinan dengan fokus penyediaan *basic life acces* untuk penduduk miskin, penguatan keberlangsungan hidup layak dan memperkuat basis data kemiskinan.

- b. Penguatan daya saing ekonomi daerah dengan fokus pada meningkatkan produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan dan optimalisasi potensi sumber daya hutan serta meningkatkan produksi dan produktivitas UKM, pariwisata dan perbaikan iklim investasi.
- c. Kualitas hidup dan daya saing SDM, fokus pada perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan, kesehatan dan mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi.
- d. Pengelolaan sumber daya alam-lingkungan hidup dan penanggulangan bencana dengan fokus pada meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan penanggulangan bencana.
- e. Ketahanan Pangan dan Energi dengan fokus pada peningkatan ketersediaan pangan, konsumsi pangan bergizi, beragam dan berimbang. Sedangkan Ketahanan energy focus pada mewujudkan pemerataan akses energy dan listrik.
- f. Kesenjangan wilayah dengan fokus pada penguatan infrastruktur, pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru dan mengoptimalkan potensi kelautan.
- g. Tata kelola pemerintahan dengan fokus pada peningkatan pelayanan public dan penciptaan pemerintahan yang bersih dan akuntable.

Secara lengkap sinkronisasi kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terdapat pada tabel 4.3.

Tabel 4.2
Sinkronisasi Prioritas RKPD Kabupaten Purbalingga dengan Prioritas RKP Pemerintah
Tahun 2019

PRIORITAS NASIONAL/PRIORITAS KAB	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	OPD PENGAMPU
1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; 1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Manusia, 2. Peningkatan Kualitas Manusia,	429,746,771,000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, ▪ Dinas Kesehatan, ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ▪ Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, ▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ▪ Dinas Perumahan dan Permukiman, ▪ Dinas SosDalduk KB PPPA Kelurahan, ▪ RSKBD Panti Nugroho, ▪ RSUD Goeteng Taroenadibrata, ▪ TK Negeri Pembina, ▪ UPT SD Negeri, ▪ UPT SMP Negeri, ▪ UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten, ▪ UPTD Puskesmas
	23,499,889,000 406,246,882,000	
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman ; 4. Pengurangan Kesenjangan Wilayah	159,460,777,000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ▪ Dinas Perhubungan, ▪ Dinas Perumahan dan Permukiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif; 3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi,	52,289,678,000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Tenaga Kerja ▪ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, ▪ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, ▪ Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, ▪ Dinas PM-PTSP ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ▪ Dinas Pertanian,
	52,289,678,000	

PRIORITAS NASIONAL/PRIORITAS KAB	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	OPD PENGAMPU
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan 1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Manusia, 4. Pengurangan Kesenjangan Wilayah, 5. Pelestarian Lingkungan Hidup,	36,070,468,000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, ▪ Dinas Lingkungan Hidup, ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	7,027,125,000	
	11,620,700,000	
	17,422,643,000	
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. 6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, 7. Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum,	126,369,351,000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, ▪ Badan Keuangan Daerah, ▪ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah,
	115,409,961,000	
	10,959,390,000	
JUMLAH	803,937,045,000	

Tabel 4.3
Sinkronisasi Prioritas RKPD Kabupaten Purbalingga dengan Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

PRIORITAS PROVINSI / PRIORITAS KAB	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	OPD PENGAMPU
1. Penanggulangan kemiskinan dengan focus penyediaan <i>basic life acces</i> untuk penduduk miskin, penguatan keberlangsungan hidup layak dan memperkuat basis data kemiskinan. Seluruh Prioritas Kabupaten Purbalingga diarahkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan	48,764,029,000	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh OPD
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah dengan focus pada meningkatkan produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan dan optimalisasi potensi sumber daya hutan serta meningkatkan produksi dan produktivitas UKM, pariwisata dan perbaikan iklim investasi. 3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi,		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Dinas Tenaga Kerja
3. Kualitas hidup dan daya saing SDM, focus pada peningkaan derajat pendidikan, kesehatan dan mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi. 1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Manusia, 2. Peningkatan Kualitas Manusia, : 3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi,	414,812,194,000	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
	5,039,663,000	
	406,246,882,000	
4. Pengelolaan sumber daya alam-lingkungan hidup dan penanggulangan bencana dengan fokus pada meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan penanggulangan bencana. 5. Pelestarian Lingkungan Hidup, 7. Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum,	19,264,861,000	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	17,422,643,000	
	1,842,218,000	

PRIORITAS PROVINSI / PRIORITAS KAB	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	OPD PENGAMPU
5. Ketahanan Pangan dan Energi dengan focus pada peningkatan ketersediaan pangan, konsumsi pangan bergizi, beragam dan berimbang. Sedangkan Ketahanan energy focus pada mewujudkan pemeratraan akses energy dan listrik. 1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Manusia,	7,027,125,000 7,027,125,000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
6. Kesenjangan wilayah dengan focus pada penguatan infrastruktur, pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru dan mengoptimalkan potensi kelautan. 1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Manusia, 4. Pengurangan Kesenjangan Wilayah,	189,541,703,000 18,460,226,000 171,081,477,000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. ▪ Dinas Perhubungan, ▪ Dinas Perumahan dan Permukiman, ▪ Kelurahan
7. Tata kelola pemerintahan dengan focus pada peningkatan pelayanan public dan penciptaan pemerintahan yang bersih dan akuntable. 6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, 7. Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum,	124,527,133,000 115,409,961,000 9,117,172,000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, ▪ Badan Keuangan Daerah, ▪ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, ▪ Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,
Jumlah	803,937,045,000	